

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para akademisi terdahulu yang memiliki pembahasan yang sebanding dengan penelitian ini. Penelitian ini akan membahas tentang perubahan sosial yang terjadi pasca pembangunan sirkuit Mandalika pada masyarakat desa Kuta dalam perspektif Sistem. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, tidak ditemukan kesamaan dengan judul yang peneliti ambil. Penelitian terdahulu yang berkaitan, sebagai berikut :

Pertama, penelitian dilakukan oleh Septiana, N.F. yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu sebuah *tesis* berjudul “Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kondisi Sisa Lahan Pertanian Masyarakat Akibat Pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih.” Penelitian ini menganalisis bagaimana pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk perubahan mata pencaharian dan pendapatan. Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat antara lain yakni adanya faktor pendorong dan faktor penghambat, lalu sisa lahan pertanian yang tidak terkena pengadaan tanah pembangunan jalan tol mengalami perubahan pada kondisi daerah resapan air yang menurun sehingga mengakibatkan banjir serta mempengaruhi produktivitas lahan pertanian menjadi menurun.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Hidayat, R. yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu sebuah jurnal berjudul “Analisis Perubahan Sosial Pasca Pembangunan Infrastruktur Jembatan Suramadu Terhadap Taraf Hidup Pedagang.” Penelitian ini meneliti bagaimana pembangunan infrastruktur besar mengubah pola mata pencaharian masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung beralih dari sektor agraris ke sektor jasa dan pariwisata. Para informan, yang mayoritas pedagang kaki lima, mengalami perubahan dalam taraf hidup mereka sejak pembangunan jembatan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran pola konsumsi dan kini para pedagang menghadapi kendala dalam menarik konsumen.

Tiga, penelitian ini dilakukan oleh Susie Suryani dan Nawarti, B. yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu sebuah jurnal berjudul “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau.” Penelitian ini membahas terkait pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata halal, berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat lokal. Studi ini menemukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal, namun juga muncul kesenjangan ekonomi antara masyarakat asli dan pendatang. Fasilitas penunjang dan pendukung wisata seperti bank, rumah sakit maupun pusat informasi pariwisata juga tersedia. Hanya saja belum merata ke seluruh daerah kabupaten dan lokasi wisata karena lebih terpusat di ibu kota propinsi.

Empat, penelitian ini dilakukan oleh Zainal A.A. dan Fafilatul L yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu sebuah jurnal berjudul “Polemik Tuntutan Warga Desa 'Miliarder' Sumurgeneng Tuban terhadap PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia.” Penelitian ini membahas konstruksi realitas yang berbeda pada berita mengenai warga Desa Sumurgeneng yang menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan kilang minyak. Studi ini menyoroti bagaimana dana ganti rugi digunakan oleh warga dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi mereka. Pertamina harus menepati janjinya untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat desa miliarder yang bekerja sama dengan pemerintah desa agar mereka memiliki skill komunikasi yang baik. Budaya & Perubahan Sosial dibutuhkan seperti mengupgrade mindset finansial mereka dan mereka juga dapat mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar lolos rekrutmen tenaga kerja, memberikan update informasi terkait proses pembangunan kilang minyak selanjutnya.

Lima, penelitian ini dilakukan oleh Elwandy, R. dan Ayang, E. yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu sebuah jurnal berjudul “Transformasi Sosial oleh Generasi Z dalam Konteks Masyarakat Majemuk.” Penelitian ini membahas terkait perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di kalangan Generasi Z, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya. Proses ini melibatkan banyak aspek yang berbeda, termasuk bagaimana struktur masyarakat dibentuk, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh

masyarakat, serta norma-norma yang mengatur bagaimana orang-orang berinteraksi satu sama lain. Perubahan ini tidak hanya terjadi di bidang budaya, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa perbedaan yang menjadi gap dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya yaitu pada fokus penelitiannya, pendekatan teori yang digunakan, juga pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek ekonomi atau perubahan sosial secara umum, penelitian ini akan mengkaji perubahan sosial pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan mentalitas secara bersamaan. Perbedaan yang kedua yaitu pada pendekatan teori yang digunakan, beberapa penelitian terdahulu menggunakan pendekatan ekonomi atau urbanisasi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem sosial dan teori perubahan sosial. Kemudian, perbedaan pada lokasi penelitian, beberapa penelitian di atas membahas perubahan sosial dalam lingkup luas di berbagai daerah di Indonesia, penelitian ini akan lebih spesifik pada desa Kuta Mandalika sebagai studi kasus.

B. Kajian Teori

1. Teori Sistem Sosial

a. Konsep Dasar Teori Sistem Sosial

Sistem berasal dari bahasa Yunani “Systema” yang memiliki arti keseluruhan, yang memiliki susunan dari banyak bagian yang saling terhubung secara teratur. Istilah sistem digunakan untuk menunjukkan

banyak hal, salah satu diantaranya yaitu untuk menunjukkan bagian-bagian yang saling berkaitan seperti organ-organ tubuh tertentu. Menurut Elias M. Awad sistem itu bersifat terbuka yang terdiri dari dua atau lebih subsistem, yang saling bergantung, mampu menyesuaikan diri, mengatur dirinya sendiri serta memiliki tujuan dan sasaran. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan lingkungannya. Sistem sendiri berhubungan dan akan bergantung secara timbal balik dengan lingkungan (Amirin, 1992).

Teori sistem pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologi Amerika bernama Talcott Parsons. Teori ini adalah bagian dari perspektif fungsionalisme struktural yang menyoroti bagaimana berbagai elemen masyarakat berfungsi bersama untuk menjaga stabilitas sosial. Semua didasarkan pada model masyarakat, kehidupan sosial, dan perilaku manusia yang berfokus pada keterkaitan manusia dan lingkungannya serta interaksi dan adaptasi mereka terhadap satu sama lain (Robbins et al., 2012). Menurut Parsons, sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau stabilitas. Masyarakat adalah sistem sosial yang dilihat secara keseluruhan. Jika sistem sosial dilihat sebagai sebuah sistem persial, maka masyarakat dilihat sebagai bagian sistem yang kecil-kecil, contohnya seperti keluarga, sistem pendidikan dan lain-lain (Poloma, 2010).

Sistem sosial merupakan sinergi antar sub sistem dalam kehidupan masyarakat yang saling bergantung dan berkaitan. Sistem sosial bersifat abstrak sehingga komponennya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dibayangkan dengan kontruksi berpikir (Nur et al., 2020). Sistem sosial

menurut Talcott Parsons terdiri dari beragam actor individual yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam situasi sosial yang setidaknya berada dalam lingkungan atau ruang fisik yang melibatkan symbol-simbol yang kultural terstruktur. Sistem sosial berkaitan erat dengan pola interaksi manusia yang teratur (Angela & Pd, 2020).

Konsep sistem sosial merupakan alat analisis realitas sosial sehingga sistem sosial menjadi suatu model analisis terhadap organisasi sosial. Sistem sosial merupakan alat pembantu yang digunakan untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia yang bertitik tolak dari pandangan bahwa kelompok-kelompok manusia merupakan suatu sistem. Menurut Wirawan, sistem sosial merupakan suatu sistem tindakan yang muncul dari sistem sosial berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang dengan secara tidak kebetulan, tetapi tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang telah disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Norma-norma sosial inilah yang nantinya akan membentuk struktur sosial (Nur et al., 2020).

Sistem sosial merupakan hubungan antara bagian-bagian yang ada di dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan Tindakan-tindakan manusia, Lembaga sosial serta kelompok-kelompok sosial yang saling mempengaruhi. Hubungan dari bagian-bagian tadi menghasilkan produk-produk interaksi berupa nilai-nilai dan norma-norma sosial yang keadaanya selalu berubah. Sedangkan menurut Wirawan, sistem sosial merupakan suatu sistem tindakan yang terbentuk dari sistem sosial berbagai

individu, yang tumbuh dan berkembang secara tidak kebetulan, tetapi tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat itu sendiri (Nur et al., 2020).

Menurut Parsons, masyarakat akan berubah dari masyarakat sederhana ke masyarakat yang kompleks, dalam hal ini, perubahan itu berjalan secara perlahan. Parsons kemudian mengembangkannya menjadi suatu masyarakat yang perlu dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan berdasarkan asumsi-asumsi yang telah disebutkan sebelumnya. Akibatnya terjadi pengaruh timbal balik antar bagian-bagian tersebut. Meskipun sistem sosial yang terintegrasi secara sempurna tidak mungkin tercapai, sistem sosial secara umum terus berupaya menuju keseimbangan, yaitu keadaan yang dinamis (Ricardo Nababan et al., 2022).

Menurut Parsons setiap sistem memiliki fungsi atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk tetap bertahan. Ciri-ciri umum ini disebut dengan *functional imperative* atau prasyarat. Ada dua pokok penting yang terdapat di dalamnya antara lain, yaitu yang **pertama** berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya, dan yang **kedua** berhubungan dengan pencapaian tujuan atau sasaran (Poloma, 2010). Berdasarkan pada premis itu, Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional, empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan atau yang dikenal dengan skema AGIL yaitu

adaptation (A), *goal Attainment* (G), *integration* (I), dan *latensi* (L) atau pemeliharaan pola. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini (Ritzer & Goodman, 2004).

Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Teori sistem mengandung asumsi tersirat mengenai sifat manusia, lingkungannya, dan perubahan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Dalam teori fungsionalis, stabilitas diperlukan untuk kesejahteraan sistem. Homeostasis diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan adaptif yang sehat, dan perubahan bertahap dan bertahap dipandang sebagai norma untuk kesejahteraan. Teori sistem fungsionalis mengandung asumsi tersirat tambahan tentang sifat manusia, lingkungannya, dan perubahan, yang pertama dan terpenting adalah asumsi bahwa stabilitas diperlukan untuk kelancaran fungsi masyarakat. Mengingat bahwa kondisi stabil sangat penting dalam mempertahankan kemampuan sistem untuk berfungsi dan melakukan koreksi diri, perubahan bertahap dan evolusioner dipandang sebagai norma (Robbins et al., 2012).

b. Skema AGIL dalam Menganalisis Perubahan Sosial

Dalam teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berkaitan. Setiap subsistem ini memiliki fungsi tertentu yang membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Parsons

mengidentifikasi empat subsistem utama yang dikenal dengan skema **AGIL** yang merupakan singkatan dari *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Masing-masing subsistem ini memenuhi fungsi tertentu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan stabilitas sistem sosial (Turama, A. R., 2020).

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Subsistem ini berfungsi untuk mengadaptasi sistem sosial dengan lingkungannya. *Adaptation* dalam hal ini melihat bagaimana masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam di sekitarnya. Ini mencakup kemampuan sistem sosial untuk menghasilkan dan mendistribusikan sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Adaptasi bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, interaksi sosial, hingga kebiasaan hidup.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan)

Subsistem ini bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan bagi sistem sosial dan mengarahkan usaha untuk mencapainya. Ini mencakup proses pengambilan keputusan dan penetapan prioritas dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat menetapkan dan mencapai tujuan tertentu dalam sistem sosial. Dalam perubahan sosial, individu dan kelompok harus menetapkan tujuan baru untuk bertahan dan berkembang.

3. *Integration (Integrasi)*

Fungsi integrasi adalah menjaga kohesi dan solidaritas dalam sistem sosial. Fungsi ini menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta bagaimana masing-masing unsur tersebut bisa berperan sesuai dengan posisinya. Integrasi ini hanya bisa terbentuk jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut dapat saling menyesuaikan.

4. *Latency (Pemeliharaan pola)*

Latency merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan dan sebagainya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. Intuisi keluarga, pendidikan dan agama sering diaktikan dengan fungsi latensi karena mereka bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai dan norma, dan kepercayaan yang menjaga keberlanjutan budaya dan sistem sosial. Latency berkaitan dengan bagaimana masyarakat mempertahankan budaya, nilai, dan norma yang sudah ada meskipun terjadi perubahan sosial. Ini penting untuk menjaga identitas masyarakat dan mencegah dampak negatif dari perubahan sosial.

Keempat gagasan yang baru saja dibahas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan suatu struktur atau sistem sosial dalam masyarakat. Keempat gagasan ini memang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu struktur atau organisasi sosial. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas,

sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya (Turama, 2020).

c. Masyarakat sebagai Sistem Sosial

Masyarakat secara umum merupakan sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu yang lama dan saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, mereka memiliki kesamaan budaya, wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Prasetyo, D., 2019) Menurut Supardan, masyarakat ialah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan dan karena sendirinya bertalian secara golongan dan merupakan sistem sosial yang akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain ini disebut dengan interaksi, dari interaksi tersebut akan menghasilkan produk-produk interaksi seperti tata pergaulan yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap kebaikan atau keburukan dalam ukuran kelompok tersebut, pandangan tentang apa yang dianggap baik dan buruk tersebut kemudian mempengaruhi perilaku sehari-hari (Nur et al., 2020).

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang terikat oleh aturan serta memiliki kebiasaan atau kebudayaan bersama. Kehidupan yang ada dalam

masyarakat merupakan salah satu suatu sistem sosial, hal ini dikarenakan di dalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Dalam suatu masyarakat, setiap individu akan saling berhubungan, saling berinteraksi antara satu sama lain serta memiliki tujuan yang sama. Unsur-unsur sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat misalnya seperti status, peranan, keyakinan, perbedaan dan lainnya (Angela & Pd, 2020b).

Kehidupan masyarakat harus dipandang sebagai sistem sosial yaitu keseluruhan bagian atau unsur-unsurnya saling berhubungan. Perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan membawa perubahan terhadap bagian yang lainnya. Asumsi dasarnya menunjukkan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap sistem yang lain. Demikian ketika tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 2014).

Masyarakat merupakan sistem sosial yang akan mengalami perubahan baik disadari atau tidak, perubahan yang terjadi ini tentunya akan menimbulkan dampak pada masyarakat berupa kemajuan maupun kemunduran. Pembangunan Sirkuit Mandalika sebagai destinasi wisata, tentu akan memberikan dampak bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar sirkuit. Pembangunan pariwisata memberikan perubahan di bidang ekonomi maupun sosial masyarakat. Erawan mengemukakan bahwa pembangunan pariwisata akan berdampak positif maupun negatif dan terjadi pada tiga pokok bidang utama yaitu ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan (Ramadhan, 2021).

2. Teori Perubahan Sosial

a. Konsep Dasar Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan sebuah proses yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang mengakibatkan adanya perubahan pada aspek sosial di kehidupan masyarakat, termasuk perubahan dalam nilai dan norma sosial, proses-proses sosial, pola perilaku sosial, gaya hidup, serta stratifikasi sosial dan juga kelembagaan masyarakat. Perubahan yang terjadi ini dapat berupa kemajuan atau kemunduran. Perubahan sosial yang termasuk dalam kemajuan ini identik dengan konsep pembangunan (development), yang merupakan dampak yang dikehendaki (functional). Sebaliknya, dampak yang tak dikehendaki oleh masyarakat disebut dengan kemunduran (disfunctional) (Suryono, 2020).

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima unsur-unsur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun lima unsur-unsur sosial tersebut, yaitu kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan serta wewenang dan kebudayaan. Hakikatnya, setiap masyarakat diseluruh dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang diketahui jika membandingkan suatu masyarakat di masa tertentu dengan masyarakat di masa lampau. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terus menerus mengalami perubahan. Akan tetapi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama karena terdapat suatu masyarakat dengan perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Angela & Pd, 2020a). Setiap

perubahan dalam suatu bagian kemasyarakatan akan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan pada bagian kemasyarakatan yang lainnya. Bagian kemasyarakatan tersebut saling terkait dan memengaruhi secara timbal balik (Soekanto, 2015).

Perubahan sosial merupakan gejala perubahan dari suatu keadaan sosial tertentu ke suatu keadaan sosial lain. Perubahan sosial pasti memiliki suatu arah dan tujuan tertentu. Perubahan sosial tidak hanya membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Dalam penelaahan mengenai perubahan-perubahan sosial yang relatif kompleks tersebut sering para ahli mengalami keaburan tertentu tentang ruang lingkup, batasan pengertian dan aspek-aspek yang utama dalam perubahan tersebut. Untuk menghindari kesulitan tersebut, maka faktor utama yang paling penting untuk diketahui dan dipahami adalah tentang batas pengertian dari perubahan sosial itu sendiri (Suryono, 2020).

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Terkait dengan perubahan dalam aspek sosial, tentu ruang lingkup perubahan sosial sangat luas, maka setiap kajian perubahan sosial diperlukan untuk membatasi atau memfokuskan aspek-aspek perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ruang lingkup dari perubahan sosial dapat dijabarkan sebagai berikut (Suryono, 2020):

1. Jenis perubahan sosial yang membahas mengenai interaksi manusia, hubungan maupun fungsinya pada masing-masing bagian, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial maupun budayanya atau yang biasa disingkat dengan rumus AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*).
2. Tingkatan perubahan sosial, melalui analisis grup kecil, organisasi, lembaga, masyarakat dan dunia.
3. Dimensi waktu perubahan sosial, dengan menjelaskan tentang adanya sebab perubahan internal dan eksternal.
4. Perubahan sosial dan interaksi atau kemauan manusia, dengan menjelaskan tentang kecenderungan yang tidak direncanakan, kecenderungan yang direncanakan.
5. Perubahan sosial lainnya, seperti perubahan akibat adanya pembangunan, perkembangan, pertumbuhan, modernisasi dan perubahan itu sendiri.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial akan mengubah struktur dan fungsi dari unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial dalam masyarakat mengandung pengertian ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Struktur sosial merupakan bentuk jalinan di antara unsur-

unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yang menunjukkan pada bentuk seluruh jaringan hubungan antar individu dalam masyarakat dimana terjalin interaksi dan komunikasi sosial.

Sedangkan sistem sosial menunjukkan pada bagaimana hubungan antara unsur-unsur sosial dalam masyarakat sehingga membentuk suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi (Silvia et al., 2020).

Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yaitu kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, filsafat dan seterusnya bahkan perubahan-perubahan bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Soekanto, 2015) menyebutkan bahwa perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup perubahan dalam nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh dari luar, seperti globalisasi, pembangunan infrastruktur, dan masuknya teknologi baru. Perubahan sosial, termasuk ekonomi, terjadi saat masyarakat terdorong untuk beradaptasi dengan kondisi baru yang dibawa dari luar komunitas mereka. Pembangunan besar seperti sirkuit Mandalika bertindak sebagai faktor eksternal yang mendorong perubahan ekonomi.

Tidak semua gejala-gejala sosial mengakibatkan perubahan dapat dikatakan dengan perubahan sosial, namun gejala yang mengakibatkan

perubahan sosial memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu (Soekanto, 2015). Ciri-ciri perubahan sosial adalah sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mengalami perubahan baik dengan lambat maupun dengan cepat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
3. Perubahan sosial yang cepat, mengakibatkan disorganisasi yang sifatnya sementara sebagai proses penyesuaian diri.
4. Tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spritual karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat.

Menurut Everett M. Rogers dalam (Suryono, 2020) pembangunan merupakan suatu proses perubahan, yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan, bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus dan terencana yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, yang bertujuan untuk perubahan kehidupan yang lebih baik.

b. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Perubahan lambat (Evolusi)

Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.

2. Perubahan Cepat (revolusi)

Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Contohnya, adanya perang dalam merebut kemerdekaan suatu negara.

3. Perubahan Sosial yang direncanakan

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan agent of change , yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan

masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

4. Perubahan Sosial yang tidak direncanakan

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

3. Konsep Kesejahteraan Sosial

a. Definisi dan Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Menurut Suharto dalam (Harjanto Setiawan, 2019), terdapat tiga perspektif utama: sebagai sistem atau aktivitas yang terorganisasi, sebagai kondisi kesejahteraan (*well-being*), dan sebagai bidang ilmu. Dalam konteks survei ini, pengertian yang digunakan adalah kesejahteraan sebagai kondisi hidup yang sejahtera. Konsep kesejahteraan sosial mencakup keadaan yang lebih baik, kebahagiaan, serta kemakmuran, yang terdiri dari tiga elemen utama: pengendalian masalah sosial, pemenuhan kebutuhan, serta tersedianya kesempatan untuk berkembang. Midgley dalam (Harjanto Setiawan, 2019) menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi di mana

manusia harus memenuhi tiga syarat utama yaitu: (1) Ketika masalah sosial dapat *dimenej* dengan baik; (2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan (3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Ketika individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat memenuhi ketiga syarat utama di atas, maka dia sudah dapat dikatakan sejahtera.

Suharto dalam (Huda, 2009) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kemampuan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, serta sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi tekanan atau guncangan hidup. Kebutuhan dasar ini mencakup penghasilan, pendidikan, dan kesehatan; sedangkan peran sosial disesuaikan dengan status sosial dan norma yang berlaku. Sementara itu, tekanan yang dimaksud termasuk masalah psikososial maupun krisis ekonomi. Keberfungsian sosial merupakan bagaimana seorang individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara normal dapat memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam batas ini, keberfungsian sosial merupakan relasi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya. Sehingga, sebagaimana dalam prinsip *ecosystem*, selain fokus pada kemampuan individu untuk beradaptasi, faktor lingkungan juga harus menjadi fokus. Relasi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya ini ditujukan untuk mendapatkan perasaan yang puas terhadap dirinya sendiri, kepuasan dalam menjalankan peranaan kehidupannya sehingga tercipta relasi positif dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, berkembang, dan menjalankan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dipandang sebagai kondisi ideal yang menjadi tujuan setiap individu. Namun demikian, pencapaian kesejahteraan tidak selalu berjalan tanpa hambatan, dan penentuan indikator kesejahteraan juga bukan perkara mudah. Meski begitu, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan sebagai acuan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Zastrow dalam (Huda, 2009) menyatakan bahwa tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah memenuhi kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan, dan rekreasi semua individu dalam masyarakat, serta meningkatkan fungsi sosial seluruh kelompok usia, baik yang kaya maupun miskin. Ketika institusi lain seperti pasar atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka layanan sosial harus hadir untuk menjawabnya. Sebagai aktivitas pertolongan (*Helping profession*), pekerja sosial bermaksud untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat.

Menurut Haryanto dan Tomagola (1997), kebutuhan dasar manusia mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Sementara itu, **UU No. 13 Tahun 2011** tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Maka, kebutuhan

material dapat dimaknai sebagai aspek fisiologis dari manusia. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan melembaga melalui layanan sosial. Suharto dalam (Huda, 2009) menyebutnya sebagai pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu upaya terorganisasi dalam bentuk intervensi dan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan, mengatasi permasalahan sosial, serta memperkuat institusi sosial.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui layanan dan jaminan sosial, khususnya bagi kelompok rentan.
2. Mendorong kemandirian ekonomi dan kelembagaan sosial-politik yang menghargai martabat manusia.
3. Memperluas kebebasan melalui akses dan pilihan hidup sesuai aspirasi serta standar kemanusiaan.

Suharto dalam (Huda, 2009) menambahkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial bersifat menyeluruh, yakni setiap layanan sosial harus memperhatikan kondisi individu maupun kelompok dalam konteks lingkungan sosial-budayanya. Fokus utamanya adalah kelompok-kelompok rentan, khususnya yang menghadapi kemiskinan. Pembangunan sosial berusaha melakukan harmonisasi antara intervensi sosial dengan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan sosial bagaikan dua sisi mata uang yang dengan jelas dapat dibedakan,

namun tidak dapat dipisahkan. Dalam praktik pekerjaan sosial, pendekatan *grand social work* digunakan untuk menanggapi ketimpangan sosial akibat pembangunan skala besar. Pendekatan makro ini menekankan pada advokasi kebijakan, pengembangan komunitas, dan reformasi sistem layanan sosial. Hal ini relevan dalam konteks pembangunan Sirkuit Mandalika yang berdampak pada dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pendamping, melainkan juga sebagai agen perubahan yang memperjuangkan keadilan, pemberdayaan, serta perlindungan hak masyarakat terdampak.

4. Konsep Kebudayaan

a. Definisi Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Adapun tindakan manusia yang didapat tidak dengan belajar seperti tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan.

Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. Bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari

cipta, karsa dan rasa itu. Kata *culture* merupakan kata yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari bahasa latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama menyangkut tanah (Silvia et al., 2020).

Menurut Malinowski, budaya merupakan, “jumlah barang, hak dan kewajiban, ide, keyakinan, kemampuan, serta adat istiadat”. Pengertian budaya yang telah dikemukakan oleh Malinowski ini menunjukkan bahwa budaya merupakan sistem komponen yang berwujud dan tidak berwujud. Komponen budaya yang berwujud ini mewakili budaya material yang tujuannya untuk mendukung kehidupan manusia, seperti pakaian, peralatan, makanan, bangunan, lukisan, artefak dan benda-benda lainnya. Sedangkan unsur-unsur budaya yang tidak berwujud akan melambangkan budaya non-material berupa nilai, keyakinan, sikap, moralitas, etika, spiritualitas, tradisi, dan adat istiadat (Kusherdiana, 2020).

Definisi budaya menurut Koentjaraningrat ialah sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Pengertian tersebut memiliki makna bahwa hampir semua tindakan manusia adalah “kebudayaan”, karena tindakan-tindakan manusia tersebut diperoleh melalui proses belajar. Bahkan semua tindakan yang bersifat naluriah, misalnya makan, juga diubah menjadi tindakan kebudayaan. Manusia memiliki waktu-waktu tertentu yang dianggap pantas untuk makan, menggunakan alat-alat tertentu, dengan tata cara dan sopan santun yang sering kali rumit (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam bukunya, Koentjaraningrat menuliskan tiga wujud kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

1. **Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide**, gagasan, nilai, norma, peraturan dan lain-lain. ini adalah wujud ideal dari kebudayaan. Seperti nilai-nilai, norma, pandangan hidup, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Ide-ide serta gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan itu selalu berkaitan menjadi sebuah sistem yang disebut sistem budaya (*cultural system*). Istilah lain dari wujud ideal ini adalah adat atau adat istiadat, kepercayaan agama, filosofi hidup atau norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat.
2. **Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan**. wujud kedua disebut sistem sosial (*social system*), berkaitan dengan tindakan berpola manusia itu sendiri. Ini merujuk pada tindakan-tindakan atau perilaku nyata yang dapat diamati dari anggota masyarakat. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan, bergaul antara satu dengan yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah adat istiadat, kebiasaan, dan ritual-ritual yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia**. Wujud ini adalah hasil fisik atau material dari kebudayaan, seperti benda-benda seni, arsitektur, pakaian, dan alat-alat teknologi yang diciptakan dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat.

Koentjara ningrat juga menekankan bahwa budaya tidak hanya dipelajari dan diterima oleh individu melalui proses sosialisasi, tetapi juga terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Menurut Koentjara ningrat, budaya dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu **budaya material** dan **non-material**.

Budaya material, merupakan hasil budaya yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk fisik atau dapat dilihat secara langsung. Ini mencakup semua benda yang dihasilkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lain yang lebih kompleks. Contohnya seperti: rumah tradisional, pakaian adat, seni kerajinan seperti patung, perhiasan, alat-alat kerja seperti cangkul, tenun dan lainnya. **Budaya non-material**, merupakan semua aspek budaya yang dihasilkan oleh manusia yang bersifat abstrak atau tidak memiliki wujud fisik, tetapi dapat dirasakan dan dipahami. Contohnya seperti: bahasa daerah, nilai-nilai dan norma, sistem kepercayaan, adat istiadat, cerita rakyat dan lain-lain. Koentjoro kembali menekankan bahwa kedua aspek ini saling berkaitan (Koentjaraningrat, 2009).

b. Ciri Kebudayaan

Maran dalam (Koentjaraningrat, 2009), menjelaskan ciri-ciri kebudayaan yaitu:

1. Kebudayaan adalah produk manusia. Manusia adalah pelaku sejarah dan kebudayaannya.

2. Kebudayaan selalu bersifat sosial, artinya kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individual, melainkan oleh manusia secara bersama, bukan karya perorangan.
3. Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Artinya, kebudayaan itu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya melalui suatu proses belajar. Kebudayaan berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan belajar manusia. Tampak di sini bahwa kebudayaan itu selalu bersifat historis, artinya proses yang selalu berkembang.
4. Kebudayaan bersifat simbolik, sebab kebudayaan merupakan ekspresi ungkapan kehadiran manusia. Sebagai ekspresi manusia kebudayaan itu tidak sama dengan manusia. Kebudayaan disebut simbolik sebab mengekspresikan manusia dan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya.
5. Kebudayaan adalah sistem pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Tidak seperti hewan, manusia memenuhi segala kebutuhannya dengan cara-cara yang beradab, atau dengan cara-cara manusiawi.

c. Unsur-Unsur Kebudayaan

Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan di dunia. Menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 2009), ada tujuh unsur kebudayaan universal yang disusun oleh beberapa sarjana antropologi.

Tujuh unsur kebudayaan ini dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, terdiri dari:

1. **Bahasa**, merupakan alat komunikasi utama dalam masyarakat, baik lisan maupun tulisan. Bahasa memungkinkan penyampaian ide, perasaan, pengetahuan dan menjadi saran yang penting untuk mewariskan budaya antar generasi.
2. **Sistem pengetahuan**, meliputi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan alam, flora dan fauna, tubuh manusia dan teknologi. Sistem ini diwariskan secara turun-temurun.
3. **Organisasi sosial**, menjelaskan tentang struktur dan organisasi dalam masyarakat, seperti sistem kekerabatan, perkawinan, kelompok sosial, dan instuisi lainnya. Sistem ini yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat.
4. **Sistem peralatan hidup dan teknologi**, merupakan segala bentuk alat dan teknologi yang digunakan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Ini mencakup alat-alat produksi, senjata, wadah, pakaian, makanan dan minuman, tempat berlindung, serta alat transportasi
5. **Sistem mata pencaharian hidup**, mengacu pada cara-cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai aktivitas ekonomi. Ini termasuk berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam serta berdagang. Sistem ini

mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan sumber daya yang tersedia.

6. **Sistem religi**, berkaitan dengan kepercayaan dan praktik spiritual dalam kehidupan masyarakat, termasuk sistem kepercayaan, upacara keagamaan. Sistem ini memberikan panduan hidup dan menjelaskan fenomena yang tak dapat dijelaskan secara rasional.

7. **Kesenian**, mencakup ekspresi estetika manusia melalui berbagai bentuk seni seperti musik, tari, lukisan, patung, dan lainnya. Kesenian mencerminkan nilai-nilai budaya dan kreativitas masyarakat, serta berfungsi sebagai media hiburan dan ritual.

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal menjelma dalam bentuk tiga wujud kebudayaan baik dalam bentuk sistem sosial, sistem budaya atau kebudayaan berbentuk fisik. Sistem ekonomi misalnya mempunyai wujud berbagai konsep-konsep, rencana-rencana, kebijaksanaan, adat-istiadat yang berhubungan dengan ekonomi.

Masyarakat ialah kumpulan orang yang hidup dalam satu daerah tertentu, yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh kecapakan, pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga penimbunan itu dalam keadaan yang sehat dan selalu bertambah isinya. Kebudayaan bersifat kumulatif bertimbun. Dapat diibaratkan manusia adalah sumber kebudayaan. Kebudayaan tidak

mungkin timbul tanpa adanya masyarakat, dan eksistensi masyarakat hanya dapat dimungkinkan dengan adanya kebudayaan (Silvia et al., 2020).

Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental, dari sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan individu dan masyarakat. Akhirnya dimana manusia hidup bermasyarakat di sanalah ada kebudayaan (Silvia et al., 2020).

4. Konsep Alienasi

Konsep alienasi diidentikkan dengan keadaan keterasingan. Alienasi terjadi ketika individu merasa terpisah dari lingkungan sosial, proses kerja, hasil kerja, bahkan dari dirinya sendiri. Dalam konteks pembangunan yang mengedepankan kapitalisme dan investasi luar, masyarakat lokal sering kali kehilangan kontrol atas sumber penghidupan, tradisi, dan struktur sosialnya. Mereka hanya menjadi objek pembangunan, bukan pelaku utama. Ketika nilai-nilai budaya tergantikan oleh tuntutan ekonomi modern, dan sistem sosial lama tergeser oleh sistem baru yang tidak mereka kuasai, muncul gejala keterasingan kolektif seperti *culture shock*, krisis identitas, penurunan kepercayaan diri, hingga tekanan psikososial. Dalam kerangka kesejahteraan sosial, alienasi ini menjadi indikator penurunan kualitas hidup dan urgensi intervensi berbasis komunitas (Sriariandini et al., 2023).

Alienasi dalam pekerjaan adalah salah satu kontradiksi pada masyarakat yang menjadi pusat perhatian dalam Dialektika Marx. Terdapat suatu kontradiksi yang nyata antara hakikat manusia yang didefinisikan dan